

**ANALISIS PERKEMBANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA  
(Studi Kasus UED-SP Candi Makmur di Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri  
Hulu)**

**Oleh:**

**Abid Rosyadi**

Dosen Pembimbing: **Dr. H Zaili Rusli SD, M.Si**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Panam Km 12.5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293, Telp/Fax  
(0761)63277

**Abstrak**

*Village empowerment program is program that aims to accelerate poverty reduction through community empowerment, provision of funding of rural enterprises, and strengthening the capacity of villages in rural development and independent participatory. The problem in this study is how the development of empowerment through Usaha Ekonomi Desa–Simpan Pinjam (UED-SP) Candi Makmur and constraints affecting the program in Candirejo village. The purpose of this study was to determine the extent of progress UED-SP candi makmur in encouraging the empowerment of the community Candirejo.*

*The concept of the theory that researchers use is productive economic empowerment and empowerment of institutional capacity. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection instrument includes interviews, observation and document data UED-SP candi makmur.*

*The results of this study indicate that after the introduction of empowerment, community empowerment and institutional capacity increased. On refund loans are still experiencing arrears or congestion due to lack of a socialization about the clarity of program goals and background characteristics of the beneficiaries of diverse cultural culture.*

**Keywords : Empowerment, Poverty, UED-SP**

**PENDAHULUAN**

Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah salah satu bentuk program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan sebagai upaya untuk meningkatkan pemerataan dan kemakmuran dengan mengadopsi konsep ‘Tri Daya’ sebagai aspek utama tujuannya yakni, melalui pemberdayaan sumber daya manusia masyarakat miskin, pemberdayaan ekonomi produktif dari masyarakat miskin, dan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat miskin. Adapun tujuan khusus dilaksanakannya Program Pemberdayaan Desa (PPD) yakni, untuk mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa/kelurahan, meningkatkan

pengembangan usaha, mengurangi ketergantungan masyarakat dari rentenir/menghindarkan masyarakat dari praktek ijon, meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan dana usaha desa/kelurahan, meningkatkan kebiasaan gotong-royong dan gemar menabung secara tertib, meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa/kelurahan serta memenuhi kebutuhan sarana/prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa/ kelurahan (Petunjuk teknis PPD Provinsi Riau, 2009: 2)

Kabupaten Indragiri Hulu dengan jumlah penduduk tahun 2010 sebesar 363.442 ribu jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebesar

32.477 keluarga miskin atau 8,9 persen dari total jumlah penduduk. Berikut uraian distribusi jumlah keluarga miskin per kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu.

Tabel 1. Jumlah Rumah Tangga Miskin Per-Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu

No	Nama Kecamatan	Jumlah Keluarga Miskin (KK)
1	Peranap	1.773
2	Batang Peranap	1.082
3	Seberida	2.352
4	Batang Cenaku	2.348
5	Batang Gansal	1.824
6	Kelayang	3.110
7	Rakit Kulim	2.670
<b>8</b>	<b>Pasir Penyau</b>	<b>2.740</b>
9	Lirik	2.081
10	Sungai Lala	1.240
11	Lubuk Batu Jaya	1.276
12	Rengat Barat	2.834
13	Rengat	2.440
14	Kuala Cenaku	1.822

Sumber: Inhu Dalam Angka 2012

Program Pemberdayaan Desa (PPD) melalui Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) bertujuan untuk mengelola Dana Usaha Desa serta Simpan Pinjam masyarakat sebagai pemecahan masalah bagi masyarakat desa. Hakikatnya pemberian pinjaman modal sesuai tujuan khusus pelaksanaan program pemberdayaan. Berikut uraian nama kecamatan penerima dana hibah Program Pemberdayaan Desa (DUD) dari pemerintah daerah tahun 2008 di Kabupaten Indragiri Hulu.

Tabel 2. Nama Kecamatan, Desa/Kelurahan Penerima Dana PPD tahun 2008 di Kabupaten Indragiri Hulu

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jumlah (Rp)
1	Batang Cenaku	Kuala Kilan	500.000.000
2	Batu Rijal Hilir	Pandan wangi	500.000.000
3	Kelayang	Sei Pasir Putih	500.000.000

4	Lirik	Japura Sei Lubuk Tigo	500.000.000 500.000.000
5	Lubuk Batu Jaya	Petalongan	500.000.000
<b>6</b>	<b>Pasir Penyau</b>	<b>Candirejo</b>	<b>500.000.000</b>
7	Rakit Kulim	Batu Sawar	500.000.000
8	Rengat	Kampong Pulau	500.000.000
9	Rengat Barat	Pematang Jaya Tanah datar	500.000.000 500.000.000
10	Seberida	Titian Resak	500.000.000

Sumber: BPM Bangdes Provinsi Riau (data olahan)

Dalam situasi dan kondisi perekonomian, dimana Desa Candirejo berada dalam kawasan perdagangan atau pasar dengan mayoritas mata pencarian penduduk adalah pedagang dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, bagi masyarakat Desa Candirejo, terbentuknya Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Candi Makmur di Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 13 Agustus 2008 diharapkan dapat mendukung usaha ekonomi rakyat terutama bagi masyarakat yang perekonomiannya rendah (kurang mampu). Dalam pelaksanaan kegiatannya UED-SP Candi Makmur mempunyai 2 (dua) jenis pinjaman yaitu :

1. Pinjaman Usaha Ekonomi Desa (UED)

Pinjaman yang bersifat dana bergulir dengan sumber modal dari Dana Usaha Desa (DUD). Dalam peminjamannya, pemanfaat dikenakan jasa pinjaman sebesar 15 persen pertahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 18 bulan.

2. Pinjaman Simpan Pinjam (SP)

Pinjaman yang bersifat dana bergulir dengan sumber dana dari simpanan pokok keanggotaan UED-SP Candi Makmur. Pemanfaat dikenakan jasa pinjaman sebesar

15 persen pertahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 6 bulan.

Jenis-jenis usaha yang bisa mendapat pinjaman dalam skala mikro berkisar 1 sampai 15 juta rupiah, sesuai kesepakatan musyawarah desa dengan jenis usaha yang dibantu sesuai dengan petunjuk teknis PPD yakni, perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri kecil dan jasa.

Berdasarkan dokumen program UED-SP candi makmur, bahwa transaksi dana dan pemanfaat mengalami kenaikan dari tahun 2009 sampai 2012. Pada tahun 2013 jumlah pemanfaat dan dana yang beredar dimasyarakat menurun. Total jumlah dana yang beredar atau diserap selama 5 tahun sebesar Rp. 2.7 milyar lebih dengan jumlah pemanfaat sebanyak 402 orang, terbagi atas pemanfaat laki-laki 206 orang dan 196 perempuan.

Pada Laporan Perkembangan Simpan Pinjam (LPP-SP) Candi Makmur tahun 2009 sampai dengan 2013, terdapat 197 pemanfaat yang melakukan pinjaman, dengan jumlah peminjam perempuan lebih banyak pada pemanfaat laki-laki. Total dana yang diserap pemanfaat sebesar Rp. 171.900.000. Kegiatan Simpan Pinjam ini, sumber dana hanya berasal dari simpanan pokok para pemanfaat dana UED-SP dengan bunga pinjaman sebesar 13 persen. Berikut uraian perkembangan dana Simpan Pinjam (SP) pada UED-SP Candi Makmur.

Tabel 3. Perkembangan Alokasi Dana Simpan Pinjam Menurut Jenis Usaha UED-SP Candi Makmur Tahun 2009-2013

Usaha/Tahun	2009	2010	2011	2012	2013
Perdagangan	6	30	56	48	51
Pertanian	-	-	-	-	-
Perkebunan	-	-	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Peternakan	-	-	-	-	-
Industri Kecil	-	-	-	-	-
Jasa	2	3	-	1	-
Jumlah	8	33	56	49	51

pemanfaat	orang	orang	orang	orang	orang
Pinjaman/Dana Beredar (Juta)	5.050	23.450	46.500	47.100	49.800

Sumber: Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP-UED) Candi Makmur, 30 Desember 2013. (data olahan).

Dalam melakukan pelunasan pinjaman, tidak semua pemanfaat membayar angsuran secara lunas, masih ada kemacetan atau nilai tunggakan yang terjadi pada UED-SP Candi Makmur. Selanjutnya dari hasil observasi dan dokumen laporan UED-SP Candi Makmur dapat digambarkan fenomena yang terjadi dan indikasi penyebabnya antara lain:

1. Adanya pemanfaat yang menggunakan dana UED-SP bukan untuk kepentingan usaha akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan lain. Hal ini berdasarkan temuan di lapangan bahwa ada pemanfaat dana UED-SP ini menggunakan dana pinjaman bukan untuk kepentingan usahanya melainkan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif.
2. Tidak semua usaha yang diberikan bantuan mengalami kemajuan tetapi tingkat pengembalian dana di UED-SP Candi Makmur berjalan cukup lancar. Hal ini berdasarkan temuan di lapangan, bahwa usaha yang dikelola salah satu pemanfaat UED-SP tidak berkembang.
3. Masih rendah pelaksanaan sosialisasi program, akibatnya adanya pemahaman masyarakat terhadap modal yang diberikan berupa dana bantuan.

Berdasarkan fenomena diatas, dalam teori sumber daya manusia memandang mutu penduduk sebagai kunci utama dalam pembangunan. Banyaknya penduduk bukan beban suatu bangsa bila mutu penduduknya tinggi, *Human capital theory*, menekankan bahwa manusia merupakan sumber daya utama, berperan sebagai subjek baik dalam taraf meningkatkan taraf hidup dirinya maupun dalam melestarikan dan memanfaatkan lingkungannya. Menurut teori

ini konsep-konsep pendidikan harus didasarkan pada anggapan bahwa modal yang dimiliki manusia itu terdapat pada dirinya sendiri, berupa sikap, pengetahuan, keterampilan, dan aspirasi (Sudjana 200:131 dalam Anwar, 2007:3).

*Teori Cultural lag* menjelaskan bahwa untuk mencapai modernisasi tingkat pedesaan, maka tidaklah memadai hanya melalui sektor pendidikan, atau intervensi dengan media massa saja, ketertinggalan dalam aspek lain, seperti pembangunan sarana perhubungan dan prasarana lainnya serta nilai perlu mendapat perhatian dalam proses pembelajaran atau pengembangan masyarakat (Alisyahbana, 1986:264 dalam Anwar, 2007:68).

Pengembangan SDM masyarakat miskin sangat penting dalam proses pembangunan, karena mereka juga merupakan bagian dari pembangunan, orang miskin merupakan modal dasar yang cukup kuat bagi pembangunan (Purnomo, 2004:142). Pemberdayaan ekonomi produktif atau usaha kecil menurut Hidayat dan Syamsulbahri (2001:31), dipengaruhi oleh beberapa variabel ekonomi, yakni :

1. Ketersediaan modal
2. Teknologi
3. Keterampilan dan Kemampuan pengelolaan usaha.

Hal ini harus didukung oleh keberdayaan kelembagaan (*social form*) yang menurut Syahyuti (2003:86) untuk mempelajari suatu kelembagaan yang mencakup aspek diluar dan didalam kelembagaan itu sendiri pada kapasitas kelembagaan (*institutional capacity*), yang menyangkut bagaimana kemampuan kelembagaan untuk mencapai tujuannya sendiri yang diukur dari lima aspek yaitu: strategi kepemimpinan yang dipakai (*strategic leadership*), perencanaan program (*program planning*), manajemen dan pelaksanaannya (*management and execution*),

alokasi sumber daya yang dimiliki (*resources allocation*), dan hubungan dengan pihak luar. Pengukuran kapasitas pada dasarnya digunakan untuk penilaian atas kekuatan kelembagaan untuk mencapai tujuan program, pelaksanaan kegiatan, atau kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

## **METODE**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini mengandalkan hasil wawancara antara peneliti dengan informan, dengan penentuan informan pada pelaksana program (*purposive sampling*) dan pada pemanfaat/masyarakat sesuai informasi yang dibutuhkan (*snowball sampling*). Kemudian observasi untuk melihat dan menganalisa kejadian-kejadian dilapangan, selanjutnya dengan menghubungkan wawancara, data atau dokumen program UED-SP Candi Makmur sesuai kebutuhan (*triangulasi data*). Penelitian dilakukan dengan menganalisis dan mengelompokkan data sesuai jenis dan bentuknya yang menjadi indikator dan faktor-faktor yang mempengaruhi program pemberdayaan pada UED-SP Candi Makmur. Kemudian data diolah secara deskriptif kualitatif.

## **HASIL**

### **A. Analisis Perkembangan PPD, UED-SP Candi Makmur.**

Ketika kebijakan pemerintah tersebut telah dijalankan dan diarahkan sedemikian rupa guna menanggulangi kemiskinan, maka pertanyaan yang perlu dijawab atau dibahas dalam penelitian ini adalah sejauh manakah program penanggulangan kemiskinan atau usaha pemberdayaan pada Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Candi Makmur telah dilaksanakan dan bagaimana perkembangannya dimasyarakat sebagai akibat dari kebijakan itu. Pembahasan dilakukan dengan menganalisa keberdayaan ekonomi pemanfaat UED-SP Candi Makmur serta kapasitas kelembagaan Desa (UED-SP)

Candi Makmur dalam mencapai tujuan program pemberdayaan.

### 1. Keberdayaan Ekonomi Pemanfaat.

Pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu aspek yang harus dilakukan dalam upaya memberdayakan masyarakat miskin. Menurut Hidayat dan Syamsulbahri (2001:31), dalam meningkatkan ekonomi produktif diukur oleh beberapa indikator yang mudah diintervensi melalui program pemberdayaan, meliputi; ketersediaan modal usaha, keterampilan dan kemampuan pengelolaan usaha, dan teknologi

#### a. Ketersedian Modal Usaha

Salah satu sumber daya utama dalam sebuah pengembangan ekonomi produktif adalah modal usaha. Sumber dana atau modal usaha merupakan salah satu faktor terpenting untuk menjalankan dan mengembangkan sebuah usaha ekonomi pemanfaat UED-SP atau usaha kecil dan menengah.

“Pinjaman dana UED-SP ini membantu saya untuk menambah modal usaha kedai, setelah barang-barang dikedai bertambah usaha saya menampakkan peningkatan dalam jual belinya dan keuntungan tentunya bertambah. Hanya saja, keuntungan cuma cukup untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi sekarang harga kebutuhan juga naik, jadi pendapatan usaha habis untuk membayar angsuran serta kebutuhan sehari-hari”.  
(Wawancara dengan Emi salah satu pemanfaat UED-SP Candi Makmur, 16 April 2014).

Ketersedian pinjaman modal dalam mendorong serta menjalankan pengembangan usahanya sangat dibutuhkan sebagai tambahan modal. Hal ini didukung oleh dokumen program, berikut jumlah pemanfaat dan besarnya penguliran dana menurut bidang usaha dari tahun 2009 sampai dengan 2013 di UED-SP Candi Makmur.

Tabel 4 Perkembangan Jumlah Pemanfaat dan Besarnya Peguliran Dana UED-SP Candi Makmur tahun 2009-2013

Tahun	Jumlah Pemanfaat	Besarnya Dana
2009	66 orang	Rp. 437.000.000,-
2010	74 orang	Rp. 509.000.000,-
2011	79 orang	Rp. 520.000.000,-
2012	108 orang	Rp. 759.000.000,-
2013	75 orang	Rp. 570.000.000,-
Total	402 orang	Rp.2.795.000.000,-

Sumber: UED-SP Candi Makmur. (Laporan Perkembangan Pinjaman UED- SP)/Data Olahan.

Dari uraian tabel 4 dana yang beredar pada pemanfaat mencapai 2.7 triliun lebih selama kurun waktu 5 tahun. Sedangkan peminjam yang memanfaatkan ketersediaan modal sebanyak 402 pemanfaat. Kebutuhan ketersediaan modal usaha bagi pemanfaat UED-SP juga didukung oleh persepsi staf analisis kredit UED-SP.

“Tingkat penguliran dana UED-SP Candi Makmur ke pemanfaat cukup besar, walau ada beberapa pemanfaat, Bahkan dana yang digulirkan sekarang tidak cukup untuk memenuhi keinginan pemanfaat untuk meminjam dana UED-SP, walau tidak semua dana kita gulirkan sekian persen kita simpan sebagai modal lembaga. Untuk itu, pemanfaat harus menunggu penguliran dana berikutnya. Artinya dana pinjaman sangat dibutuhkan warga Desa Candirejo”  
(Wawancara dengan Staf Analisis Kredit UED-SP Candi Makmur, 26 April 2014).

#### b. Keterampilan dan Kemampuan Pengelolaan Usaha

Kemampuan pengelolaan usaha dapat dilihat dari struktur pendapatan, perkembangan usaha pemanfaat setelah menerima program pemberdayaan tersebut. Menurut pemanfaat pendapatan setelah malakukan pinjaman mengalami kenaikan.

“Setelah adanya program ini, pendapatan saya bertambah, tapi dalam menjalankan usaha bergantung pada ketekunan kita. Dalam usaha semakin bervariasi dan banyak barang ditoko dalam jenis dagangan yang sama, semakin besar peluang orang untuk berbelanja, kalau pendapatan bertambah setelah adanya program ini” (Wawancara dengan Emi salah satu pemanfaat UED-SP Candi Makmur, 16 April 2014).

Pada keterampilan pemanfaat dalam membuat proposal usaha (*technical skill and conceptual skill*) setelah adanya program pemberdayaan berjalan baik atau meningkat. Persepsi Staf Analisis Kredit berkaitan dengan pembuatan proposal usaha pemanfaat.

“Dalam membuat pengajuan proposal usaha yang selama kita verifikasi tidak ada masalah, jika ada kesalahan dalam membuatnya kita memberi arahan untuk diperbaiki, yang jelas, proposal pengajuan usaha yang dibuat tidak ada yang kita batalkan secara konsep/administrasi pembuatannya, pemanfaat membuatnya cukup baik dari tahun ketahunnya, dikarenakan mungkin adanya contoh proposal dan komunikasi antara pemanfaat” (Wawancara dengan Staff Analisis Kredit UED-SP Candi Makmur, 02 Mei 2014).

c. Teknologi

Teknologi dalam penelitian ini meliputi sarana ekonomi, antara lain, kelayakan lembaga permodalan dan kemudahan menjangkau lembaga, ketersediaan atau kelayakan pasar. Berikut persepsi pemanfaat dan pengelola berkaitan dengan teknologi dalam mendorong keberdayaan ekonomi pemanfaat.

“Untuk menunjang operasional UED-SP ini kami sudah mempunyai sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan proses kegiatan UED-SP ini, mulai ruangan kantor yang cukup

nyaman, dan fasilitas lainnya seperti laptop, meja dan kursi serta lemari pengarsipan sehingga kami bisa bekerja dengan baik”. (Wawancara dengan Ketua UED-SP Candi Makmur, 03 Mei 2014).

“Dalam membantu mendorong pemasaran usaha pemanfaat kami rasa tidak ada masalah karena Desa Candirejo terletak di jalur perdagangan yang memiliki 2 pasar yakni pasar Sri Gading dan pasar lama yang keduanya masuk wilayah perbatasan Desa Candirejo jadi kita hanya memberikan saran agar pemanfaat serius dalam berusaha”. (Wawancara dengan Staff Analisis Kredit UED-SP UED-SP, 27 Mei 2014).

Teknologi yang dimiliki oleh lembaga dari segi sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan kelembagaan untuk pemberdayaan pemanfaat sudah memadai. Sedangkan kelayakan pasar sebagai tempat usaha pemanfaat sudah tersedia, hal ini dikarenakan Desa Candirejo terletak pada jalur pasar atau perdagangan dan sarana transportasi yang lancar bagi pemanfaat. Selain itu, hal ini didukung inventaris program UED-SP Candi Makmur bahwa ketersediaan sarana dalam proses kegiatan pengelola untuk mendorong keberdayaan sebagai alat pendukung pemberdayaan menurut pengelola cukup memadai.

Table 7. Daftar inventaris UED-SP Candi Makmur

No	Jenis Inventaris	Jumlah
1	Laptop	2 Unit
2	Printer	1 Unit
3	Meja	3 Unit
4	Kursi	5 Unit
5	Filling Cabinet	1 Unit
6	Mesin Tik	1 Unit

7	Papan Informasi	1 Unit
8	Lemari	1 Unit

Sumber : UED-SP Candi Makmur.

## 2. Keberdayaan Kelembagaan UED-SP Candi Makmur

Pemberdayaan kelembagaan desa, dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan desa, sehingga partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat tumbuh dan berkembang. Kapasitas kelembagaan (*Institutional capacity*), menyangkut bagaimana kemampuan kelembagaan untuk mencapai tujuannya sendiri yang diukur dari lima indikator atau aspek yaitu: Strategi kepemimpinan yang dipakai (*Strategic leadership*), perencanaan program (*program planning*), manajemen dan pelaksanaannya (*management and execution*), alokasi sumber daya yang dimiliki (*resources allocation*), dan hubungan dengan pihak luar (Syahyuti, 2003:86)

### a. Kepemimpinan

Kepemimpinan menurut para ahli. D.E Mc. Farland (1978) dalam Danim (2012:55), merupakan suatu proses dimana pimpinan akan memberi perintah atau pengaruh, bimbingan atau proses mempengaruhi pekerjaan orang lain dalam memilih dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan adalah pihak-pihak yang diberikan otoritas dan kewenangan sesuai struktur organisasi untuk mengarahkan, membimbing dan bahkan mengambil keputusan (Amtu, 2011:52). Likert dalam Danim (2012:70), kepemimpinan pengelola UED-SP Candi Makmur dapat dilihat dari proses komunikasi dan interaksi yang terjadi dalam kegiatan UED-SP.

“Dalam melaksanakan kegiatan, untuk diskusi penyelesaiannya jarang terjadi, pertemuan-pertemuan bulanan hamper dibilang tidak pernah dilakukan. Pertemuan hanya dilakukan pada rapat

musyawarah tahunan” (*Wawancara dengan Staf Analisis Kredit Ketua UED-SP Candi Makmur, 26 April 2014*).

Dari wawancara diatas dapat dianalisa bahwa intensitas diskusi atau komunikasi sangat rendah dilakukan oleh pengelola.

“Sepengetahuan saya, dalam proses kegiatan sangat bergantung pada staf analisis kredit, dikarenakan pembukuan, pengajuan, pencairan dan verifikasi proposal pengajuan tugasnya berada ditangan kasir dan staf analisi kredit yaitu buk dewi”. (*Wawancara dengan Sekretaris Desa Candirejo, 28 April 2014*).

Komunikasi dan interaksi yang dilakukan sesama pengelola intensitasnya rendah walau terdapat keterbukaan informasi dalam rapat tahunan. Selain itu, hal ini didukung berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada pengurus desa dan pemanfaat terhadap keperluan penelitian peneliti yang mengarahkan kepada staff analisis kredit untuk mengetahui bagaimana proses kegiatan UED-SP secara keseluruhan.

### b. Perencanaan UED-SP

Perencanaan merupakan kegiatan menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan tersebut, Brantas (2009:28). Proses perencanaan dapat diukur dari proses keterbukaan dalam sosialisasi program serta partisipasi peserta dalam rapat untuk melakukan evaluasi kegiatan dan penetapan tujuan selanjutnya.

Berdasarkan tata tertib pelaksanaan Musyawarah Desa Pertanggung Jawaban Tahunan (MDPT) atau (AD/ART) UED-SP Candi Makmur dalam Pasal 3 bahwa peserta rapat anggota tahunan adalah:

1. Anggota UED-SP Candi Makmur yang telah mempunyai simpanan pokok

2. Pengelola UED-SP Candi Makmur dan pelaksana program
3. Undangan
  - a. Camat Pasir Penyu
  - b. Kepala Desa Candirejo
  - c. Ketua BPD dan Anggota BPD Desa Candirejo
  - d. Ketua LPM dan Anggota
  - e. Tokoh Masyarakat Desa Candirejo
  - f. Undangan lainnya.
4. Pengunjung tidak aktif, yakni masyarakat yang belum menjadi anggota UED-SP.

“Dalam rapat tahunan, saya menyampaikan hasil tentang LPJ pengelola UED-SP Candi Makmur dan selanjutnya pertemuan kita berfokus pada tujuan UED-SP, terkait kondisi UED-SP keuangan. Tidak ada putusan final pelatihan ataupun evaluasi terhadap pemanfaat hanya berupa saran kepada pemanfaat karena sudah ada petunjuk teknis, sedangkan sosialisasi program berjalan sesuai dengan rencana, sosialisasi tahunan teradi pada awal bulan setiap tahunnya. Hanya saja dalam musyawarah tahunan partisipasi warga yang hadir berkisar 30-40 persen dari jumlah pemanfaat yang melakukan pinjaman. Kita tidak tahu alasannya kenapa, mungkin karena kesibukan kerja”.  
(*Wawancara dengan Staf Analisis Kredit UED-SP Candi Makmur, 02 Mei 2014*).

Persepsi pengelola pada wawancara diatas menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mendorong program pemberdayaan dalam perencanaan kegiatan masih rendah, atau partisipasi khususnya pemanfaat UED-SP belum optimal. Keterbukaan sosialisai mengenai UED-SP sudah diketahui masyarakat, walaupun ada pemanfaat yang mengetahui tidak langsung dari sosialisai yang dilakukan pelaksana program pemberdayaan desa.

#### c. Manajemen Pelaksanaan

Manajemen pelaksanaan kegiatan UED-SP dalam program pemberdayaan yang dimaksud dalam penelitian ini, antara lain meliputi; pengelolaan dan gerak pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan perencanaan dan keterlibatan-keterlibatan masyarakat dalam menentukan sasaran program serta kesesuaian tugas dan tanggung jawab pengelola dengan pelaksanaan.

Secara umum tugas dan tanggungjawab pengelola UED/K-SP adalah :

- a. Mensosialisasikan kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan kepada masyarakat desa/kelurahan dan mengumpulkan aspirasi masyarakat desa/kelurahan.
- b. Mempersiapkan individu-individu rumah tangga/kelompok usaha penerima Dana Usaha Desa/Kelurahan.
- c. Mempersiapkan individu-individu rumah tangga/kelompok usaha penerima Dana Usaha Desa/Kelurahan sehingga mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen serta menyalurkan Dana Usaha Desa/Kelurahan untuk kegiatan sesuai dengan rencana penggunaan kepada penerima Dana Usaha Desa/Kelurahan.
- d. Mengelola Dana Usaha Desa/Kelurahan serta dana simpan pinjam masyarakat.
- e. Mengatur dan memastikan perguliran dana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
- f. Menyusun RKTL tahunan dan bulanan yang difasilitasi oleh Pendamping Desa.
- g. Pengelola UED/K-SP melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin selanjutnya diberikan pinjaman.
- h. Melakukan verifikasi terhadap usulan proposal masyarakat.

Berikut wawancara peneliti dengan pengelola program berkaitan dengan manajemen pelaksanaan kegiatan UED-SP dan keterlibatan masyarakat.

”Kami sudah melakukan verifikasi terhadap calon pemanfaat UED-SP, memeriksa administrasi dan proposal usahanya, memang hanya sebagian kecil

usaha yang kami survey ke lapangan. Namun ternyata di lapangan dana UED-SP tidak dipergunakan untuk kepentingan usaha sesuai dengan proposal usaha masyarakat tersebut”.(Wawancara dengan Staf Analisis Kredit UED-SP Candi Makmur, 26 April 2014).

“Setahu saya, dalam pelaksanaan kegiatan sangat bergantung pada staf analisis kredit, di karenakan kegiatan keuangan seperti pembukuan, pengajuan pinjaman, pencairan dan verifikasi proposal pengajuan tugasnya berada ditangan kasir yang juga sebagai staf analisis kredit yaitu buk dewi. Dan semua kegiatan keuangan berjalan lancar”. (Wawancara dengan Sekretaris Desa Candirejo, 28 April 2014).

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa menurut persepsi Seketaris Desa yang bekerja di Kantor Desa, dimana ruangan/kantor UED-SP berada bahwa dalam pelaksanaan kegiatan harian bahwa fokus kerja pengelola UED-SP berada pada staf analisis kredit. Artinya, secara mayoritas tugas dan tanggung jawab pengelola UED-SP secara umum berada pada staf analisis kredit.

Dalam kapasitas kelembagaan pada proses manajerial yang menuntut digunakannya seperangkat kecakapan baru yaitu membuat mampu (*enabling*), memperlancar (*facilitating*), berkonsultasi (*consulting*), bekerjasama (*collaborating*), membimbing (*mentoring*), dan mendukung (*supporting*) (Steward, 1998:77 dalam Makmur, 2008:62). Berikut wawancara penelitian berkaitan dengan proses manajerial pada pengelola dalam pelaksanaan tugasnya.

“Kordinasi biasanya dilakukan menjelang rapat tahunan, dimana laporan pertanggung jawaban akan disampaikan. Namun, kelancaran kegiatan peguliran dana berjalan baik. (Wawancara dengan

*Staf Analisis Kredit UED-SP Candi Makmur, 2 mei 2014).*

“Pelatihan dan pembinaan untuk pengelola UED-SP memang ada diawal terbentuknya lembaga, setelah itu tidak pernah ada pelatihan bagi pengelola apalagi untuk pemanfaat UED-SP sampai saat sekarang ini masih belum ada. Kami hanya memberikan arahan serta saran kepada pemanfaat untuk menggunakan dana yang diberikan dalam mengembangkan usaha”. (Wawancara dengan KPM UED-SP Candi Makmur, 5 Mei 2014).

Dari wawancara diatas menggambarkan bahwa persepsi pengelola program dan Sekretaris Desa/Masyarakat terhadap manajemen pelaksanaan dalam penyelesaian tugas untuk mendorong keberdayaan telah berjalan, namun terjadi pelimpahan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya yang banyak terfokus pada staf analisis kredit. Kapasitas pengelola dalam membimbing, mempelancar program keberdayaan pada proses kegiatan UED-SP tergolong rendah, disebabkan interaksi pemanfaat hanya terfokus pada staf analisis kredit.

#### d. Alokasi Sumber Daya

Dalam penelitian ini, dimaksudkan alokasi sumber daya adalah sejauh mana dana yang digulirkan organisasi atau lembaga mencapai tujuannya. Keberhasilan alokasi dana UED-SP dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari jumlah masyarakat miskin/pemanfaat yang mampu dilayani oleh program, jumlah dana yang diterima atau tingkat pengembalian dana dan perkembangan jumlah dana dan usaha.

Dari laporan perkembangan pinjaman (LPP-UED) diketahui perkembangan dana yang dipinjam pemanfaat/diserap pemanfaat meningkat pertahunnya. Selain itu perbandingan jumlah masyarakat yang memanfaatkan dana UED-SP tergolong tinggi apabila dibandingkan dengan jumlah

masyarakat Desa Candirejo pada usia kerja produktif pada kelas ekonomi menengah kebawah. Hal ini didukung dengan wawancara penelitian berkaitan dengan masyarakat yang dilayani terhadap peguliran dana dan perkembangannya.

“Pemanfaat yang telah melakukan pinjaman dana UED dari awal kini berjumlah 420 pemanfaat lebih, hampir seluruh masyarakat menengah kebawah telah melakukan pinjaman. Sedangkan pengajuan proposal pinjaman usaha hampir semuanya untuk dagang atau jasa seperti bengkel, warung dan sejenisnya sesuai dengan kultur ekonomi mata pencarian masyarakat kelas menengah di Candirejo”. (*Wawancara dengan Staf Analisis Kredit UED-SP Candi Makmur, 02 Mei 2014*).

Dari hasil wawancara dapat digambarkan dan dianalisa bahwa persepsi pengelola berkaitan dengan keberdayaan alokasi dana lembaga UED-SP Candi Makmur dalam melayani pinjaman pemanfaat sangat baik dikarenakan hampir semua masyarakat menengah kebawah melakukan pinjaman dana ke UED-SP Candi Makmur. Dari awal berdiri hingga April 2014 sebanyak 420 pemanfaat melakukan pinjaman dengan mayoritas jenis usaha perdagangan.

Dari dokumen program dapat digambarkan bahwa kemampuan program dalam mencapai tujuan secara keseluruhan berada pada kategori sedang, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan jumlah usaha yang relatif rendah meskipun terdapat peningkatan jumlah modal usaha setelah menerima program PPD. Selain itu jumlah masyarakat yang dilayani dari jumlah dana yang diserap termasuk kategori tinggi.

#### e. Hubungan dengan Pihak Luar

Upaya-upaya yang dilakukan organisasi dalam mendorong keberlanjutan perkembangan dalam mendorong keberdayaan terhadap partisipasi pemanfaat

dan usahanya dapat dilihat dari jaringan kerjasama yang terbentuk dengan pihak luar. Berikut gambaran wawancara peneliti berkaitan dengan hubungan lembaga UED-SP Candi Makmur dengan pihak luar.

“Kurangnya kerjasama dan koordinasi antara pengelola UED-SP menyebabkan hubungan dengan pihak luar terkesan minim. Pasar yang dimiliki pemanfaat telah ada sehingga pengelola tidak menambahkan modal lembaga UED-SP dalam melakukan peguliran dana” (*Wawancara dengan KPM Candi Makmur, 5 Mei 2014*).

Dari wawancara diatas dapat dilihat kemampuan untuk melakukan hubungan dengan pihak luar dari lembaga masih rendah. Hal ini disebabkan kurangnya interaksi pengelola. Adanya 2 pasar induk kecamatan yang masuk/berbatasan dengan desa Candirejo menjadi persepsi pelaksana program bahwa hal tersebut telah mendorong atau tidak perlunya hubungan kerjasama dari sisi pemasaran usaha pemanfaat.

## **B. Faktor-Faktor Mempengaruhi Program Pemberdayaan, UED-SP Candi Makmur**

### 1. Sosial Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting dalam keberhasilan sebuah program, semakin berkualitas sumber daya manusianya semakin tercapai tujuan dari program yang dijalankan. Dalam pelaksanaan UED-SP ini diperlukan pengelola yang mempunyai tingkat pendidikan yang memadai, pengalaman sesuai pekerjaan yang dilaksanakan, tanpa sumber daya manusia yang memadai implementasi kebijakan akan mengalami kegagalan. Oleh karena itu sumber daya yang dimaksudkan mencakup :

- 1) Jumlah staff pelaksana yang memadai dengan keahlian yang memadai,
- 2) Informasi,
- 3) Wewenang atau kewenangan dan

- 4) Fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menjamin kebijakan dijalankan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan sebuah program dan pengembangan program, sumber daya manusia mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan program, begitu pula dengan program UED-SP. Sumber daya manusia sangat mempengaruhi yaitu yang berkaitan dengan karakteristik dan kemampuan yang dimiliki oleh pengelola ataupun pemanfaat. Berikut adalah wawancara peneliti tentang SDM yang dimiliki oleh pengelola:

“Di UED-SP Candi Makmur ini jumlah staffnya terdiri dari satu orang ketua, satu orang kasir yang juga staff analisis kredit. Dimana ketua tamatan D3, saya sendiri kasir/staf analisis kredit tamatan S1 ekonomi dan TU tamatan SMA kejuruan. Dalam menjalankan tugas saya mempunyai kewenangan untuk memberikan pinjaman kepada pemanfaat berdasarkan hasil verifikasi proposal usaha dan adanya agunan. Kami sebagai pengelola baru kali ini mengelola program seperti ini yang membutuhkan kemampuan dan keahlian untuk mengelola keuangan. Pelatihan yang diikuti pengelola hanya sekali pada awal berdirinya lembaga, setelah itu tidak ada”. (*Wawancara dengan Staf Analisis Kredit UED-SP Candi Makmur, 26 April 2014*).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan pengelola sudah cukup memadai tetapi disini pengalaman dan keahlian pengelolaan tentang keuangan UED-SP secara keahlian hanya dimiliki oleh staf analisis kredit. Pengelola lainnya tidak memadai dikarenakan pendidikannya bukan mengenai keuangan atau ekonomi, ditambah kurangnya pelatihan tentang keuangan yang diikuti pengelola, maka dari itu peran dan fungsi pengelola secara keseluruhan kurang optimal.

Sumber daya pemanfaat dinilai dari mampu atau tidaknya pemanfaat dalam mengelola dana UED-SP yang telah diberikan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraannya. Tingkat pendidikan dan pengalaman mempengaruhi kemampuan pemanfaat dalam mengembangkan usahanya sehingga usahanya dapat maju dan berkembang sesuai dengan tujuan dari UED-SP. Pengalaman dan kemampuan seseorang sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha. Berikut adalah wawancara dengan salah satu pemanfaat UED-SP yang meminjam dana UED-SP.

“Awalnya Saya hanya sebagai ibu rumah tangga, kemudian saya tertarik untuk meminjam di UED-SP sebagai tambahan modal dengan rencana usaha membuka warung yang menjual barang harian, pada awalnya usaha saya lancar-lancar saja tetapi uang hasil warung dengan uang kebutuhan sehari-hari saya campurkan, jadi uang warung terpakai juga untuk kebutuhan sehari-hari keluarga kami”. (*Wawancara dengan Rosna salah satu pemanfaat UED-SP Candi Makmur, 3 Mei 2014*).

Dari hasil wawancara dapat digambarkan bahwa seorang pemanfaat yang ingin berusaha tetapi kurang mempunyai kemampuan dan pengalaman memadai mengenai keuangan, sehingga uang hasil dari warungnya terpakai untuk kebutuhan sehari-harinya, akibatnya usaha tersebut macet. Bagi masyarakat miskin yang pada awalnya sudah mempunyai usaha sudah tentu mereka sudah mempunyai kemampuan dan pengalaman untuk mengelola usahanya, tetapi bagi masyarakat yang belum mempunyai usaha sebelum meminjam dana UED-SP ini mereka kurang mempunyai kemampuan dan pengalaman tentang hal ini. Sedangkan pengelola hanya memberikan pinjaman dana saja, tidak disertai dengan pelatihan dan pembinaan untuk masyarakat yang sebelumnya belum memiliki usaha.

## 2. Faktor Sosial Ekonomi

Faktor ekonomi mempengaruhi pemanfaatan dana pinjaman, banyak peminfaat yang menggunakan dana pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga tujuan dari program tidak tampak dikarenakan dana habis begitu saja. Berikut wawancara dengan salah satu peminfaat UED-SP :

“Saya meminjam di UED-SP sebesar Rp. 5.000.000, ( lima juta Rupiah ) yang rencananya akan saya pergunakan untuk mengembangkan usaha bengkel, tetapi pada saat dana sudah diterima saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya yang diperlukan saat itu, Pada akhirnya saya tidak jadi tambahan modal dalam mengembangkan bengkel karena uangnya sudah saya pergunakan”. (Wawancara dengan Hanif salah satu peminfaat UED-SP, 17 April 2014).

Dari hasil wawancara dapat kita ketahui bahwa peminfaat yang awalnya ingin menggunakan dana pinjaman untuk mengembangkan usahanya, namun pada saat itu keperluan ekonomi membuat peminfaat menggunakan dana pinjaman UED-SP itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain dari pada itu, berdasarkan yang ditemukan dilapangan diketahui tingkat pendapatan peminfaat juga mempengaruhi pemanfaatan dana UED-SP yang diberikan, dimana minimnya pendapatan peminfaat mengakibatkan peminfaat menggunakan dana UED-SP untuk memenuhi kebutuhannya yang lain bukan untuk mengembangkan usahanya.

## 3. Faktor Budaya

Salah satu faktor yang sulit untuk dirubah dalam masyarakat adalah faktor budaya, dimana masyarakat kita biasanya berduyunduyun untuk mendapatkan dana pinjaman dari program pemerintah, karena masyarakat beranggapan setiap dana yang disalurkan pemerintah adalah dana hibah dan tidak perlu

dikembalikan. Berikut adalah wawancara dengan salah satu peminfaat dana UED-SP.

“UED-SP ini kan program dari pemerintah untuk memberikan pinjaman kepada kami yang membutuhkan, jadi uang ini kami pergunakan untuk kebutuhan hidup kami. Kalau seandainya kami tidak sanggup mengembalikan dana, ya tidak kami kembalikan, kan ini dananya kan dana pemerintah bearti uang rakyat juga”. (Wawancara dengan Amris salah satu peminfaat UED-SP Candi Makmur, 20 April 2014).

Dari hasil wawancara dapat digambarkan bahwa masih adanya masyarakat beranggapan bahwa dana UED-SP adalah dana hibah dari pemerintah sehingga peminfaat beranggapan dana UED-SP tersebut tidak perlu dikembalikan. Selain itu, budaya konsumtif yang ada di masyarakat sangat mempengaruhi pengembalian dan pemanfaatan dana UEDSP yang diberikan. Hal lainnya, beranekaragamnya kultur peminfaat menyulitkan pengelola dalam mengidentifikasi karakter peminfaat sehingga mempengaruhi tingkat pengembalian peminfaat. Hal tersebut, menjadi salah satu faktor UED-SP Candi Makmur belum menjadi BUMDes. Berikut wawancara penelitian berkaitan dengan tujuan menuju UED-SP mandiri.

“Kita pengelola belum mengambil langkah menuju BUMDes dikarenakan tingkat pengembalian UED yang hanya menurun dari 96 persen menjadi 94 persen. Sedangkan tingkat pengembalian SP dari 96 persen menjadi 85 persen. Hal ini disebabkan peminfaat yang latar belakangnya berbeda-beda, tidak seperti UED-SP di wilayah transmigrasi”. (Wawancara dengan Staf Analisis Kredit UED-SP Candi Makmur, 02 Mei 2014).

Berdasarkan wawancara terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi UED-SP Candi Makmur yang meliputi Sumber Daya Manusia, Faktor Sosial Ekonomi dan Budaya

Masyarakat dapat dianalisa bahwa untuk meningkatkan SDM perlunya pelatihan pada pengelola dan pemanfaat mengenai manajemen keuangan dan tujuan UED-SP, sehingga dapat mendorong kesejahteraan atau ekonomi pemanfaat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan peneliti tentang analisa perkembangan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam di Kecamatan Pasir Penyu (studi kasus Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam/UED-SP Candi Makmur) adalah sebagai berikut :

1. Keberdayaan sumber daya manusia dari sisi pengetahuan secara umum di Desa Candirejo memadai. Setelah dilakukan program pemberdayaan mengalami peningkatan yang cukup. Hal ini dikarenakan meningkatnya kemampuan pemanfaat dalam menyusun proposal dan membuat profil usaha
2. Keberdayaan ekonomi pemanfaat setelah mendapat program (UED-SP) dari profil usaha, ketersediaan modal, teknologi dan keuntungan usaha mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini mengindikasikan bahwa UED-SP telah mampu memfasilitasi akses modal, teknologi pada kegiatan ekonomi produktif pemanfaat, sehingga mampu memperbaiki proses produksi dengan meningkatnya keuntungan.
3. Keberdayaan lembaga UED-SP Candi Makmur dilihat dari alokasi Dana masih berada pada kategori sedang, dikarenakan masih lemahnya perencanaan dan pelaksanaan pendistribusian dana sehingga kesesuaian dan ketepatan pengembalian dana ditingkat pemanfaat tergolong cukup besar. Hal tersebut, tentunya akan mengganggu pelaksanaan kegiatan kelembagaan berikutnya.
4. Keberdayaan lembaga UED-SP yang dilihat dari hubungan dengan pihak luar

masih berada pada kategori rendah. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kemampuan lembaga UED-SP dalam membentuk jaringan kerja sama dengan pihak luar terutama yang berada di tingkat kecamatan dan Desa.

5. Pada faktor yang mempengaruhi Program pemberdayaan, ditemukan faktor SDM khususnya pada keahlian keuangan sangat mempengaruhi dalam manajemen pelaksanaan kegiatan UED-SP. Sedangkan sosial budaya masyarakat sangat berpengaruh terhadap pengembalian modal UED-SP Candi Makmur. Hal ini terlihat pada pemanfaat yang menggunakan dana pinjaman UED-SP bukan untuk usahanya tetapi dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu pula dengan kultur budaya pemanfaat yang beraneka ragam, adanya persepsi dimasyarakat kalau dana program pemerintah adalah dana hibah dan tidak perlu dikembalikan, untuk itu, diperlukan identifikasi dan sosialisai kejelasan tujuan program yang lebih kepada pemanfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amtu, Onisimus. 2011. *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah*. Alfabeta. Bandung.
- Anwar. 2007. *Menejemen Pemberdayaan Perempuan. Perubahan Sosial Melalui Pembelajaran Vocational Skill*. Alfabeta. Bandung.
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Alfabeta. Bandung.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Edisi pertama. Kencana Preneda Media Group. Jakarta.
- Danim, Sudarwan. 2012. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektifitas Kelompok*. Rineka Cipta. Jakarta.

- Hidayat dan Syamsulbahri. 2001. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Pustaka Quantum. Jakarta.
- Makmur. 2007. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektifitas Organisasi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Pasalong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Purnomo. 2004. *Pembaharuan Desa: Mencari Bentuk Penataan Produksi Desa*. Pustaka Jogja Mandiri. Jakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sutrisno, H.E. 2007. *Budaya Organisasi*. Kencana Pranadamedia Group. Jakarta.
- Syahyuti. 2003. *Bedah Konsep Kelembagaan: Strategi Pengembangan dan Penerapannya dalam Penelitian Pertanian*. Badan Litbang Pertanian. Bogor.
- Widjaja. H.A.W. 2003. *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Yasin. 2003. *Masa Depan Agribisnis Riau*. Unri Press. Pekanbaru.
- Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 78 tahun 2009 Tentang Pedoman Umum dan Petunjuk teknis Program Pemberdayaan Desa.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Candirejo Tahun 2010-2015.
- Dokumen Program UED-SP Candi Makmur

